

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah kata bahasa Arab yang terambil dari kata salima yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta seluruh alam semesta, yakni Allah SWT. Dengan demikian islam berarti penyerahan diri kepada Allah SWT. Tegasnya agama disisi Allah ialah penyerahan diri yang sesungguhnya kepada Allah. Jadi walaupun seseorang mengaku beragama islam, kalau dia tidak menyerah yang sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia islam, sebab dia belum menyerah atau tunduk. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan hidup bagi manusia. Selanjutnya, islam memandang bahwa manusia didunia hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan didunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi, namun demikian, nasib seseorang diakhir nanti sangat bergantung pada apa yang dikerjakannya didunia.¹

Keduanya merupakan suatu rangkaian keilmuan yang tentunya mencakup segi ibadah dan mu'amalah. Seperti halnya tentang segi penetapan hukum. Dalam al-qur'an ada ketentuan yang tidak dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam bagian ibadah mahdloh, namun adapula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (*ijtihad*) manusia, terutama dalam bagian mu'amalat. Dalam kasus-kasus tertentu

¹ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 1.

manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya.²

Aldunya mazra'at al-akhirat (dunia adalah ladang akhirat). Disinilah letaknya peran islam sebagai pedoman dan petunjuk mengenai bagaimana caranya menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakannya itu, baik didunia maupun diakhirat. Konsekuensi dari pandangan diatas adalah bahwa ajaran islam itu tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*habluminallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antara sesama manusia (*hablum minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam semesta dan lingkungan.³ Jadi, Islam adalah suatu cara hidup, *way of life* yang membingbing seluruh aspek kehidupan manusia⁴. Dalam ajaran islam, hukum asal mu'amalah adalah mubah, tak terkecuali dalam hal investasi.⁵

Kehidupan manusia di era globalisasi serba modern seperti saat ini, banyak permasalahan yang belum tertuang secara jelas dalam al-qur'an maupun hadits. Dan ini tentunya sulit dipahami oleh masyarakat awam, padahal mereka membutuhkan keterangan yang jelas tentang kehukuman permasalahan tersebut. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT, dari berbagai sudut apapun telah Allah atur dan telah Allah perintahkan termasuk aturan-aturan yang

²Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 35.

³Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Tabarru*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 5.

⁴Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm 2.

⁵Ash Shawi dan Abdullah, 2004, *Dalam Dahlan*, 2015, hlm. 97.

ada dalam Fiqih Mu'amalah, hubungan manusia dengan manusia lainnya itu adalah salah satu bentuk ibadah untuk menggapai ridho-Nya. Mu'amalah mengatur segala aspek hukum yang berhubungan antara manusia dengan benda. Semuanya telah diatur oleh hukum islam dengan rapih. Berbagai praktek perekonomian yang diatur dengan sebaik mungkin sehingga dari mulai kontrak kerja sama sampai kedalam keberhasilan dalam berusaha. Hidup didunia manusia bukan hanya praktik dengan hanya mendapatkan keuntungan tapi berfikir juga dengan kemanusiaan, sehingga banyak yang mengatur tentang perniagaan dan tolong menolong.⁶

Sistem ekonomi islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran islam secara integral dan komprehensif. Sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi islam mengacu pada saripati ajaran islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaannya. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya

⁶Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hlm. 6.

kewajiban setiap individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁷

Akad tolong menolong dalam syari'ah dinamakan akad *tabarru* (*gratuitous contract*) yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan.⁸ Dalam akad *tabarru* pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya karena ia hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT. Pada hakikatnya, akad *tabarru* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapka balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan mencari keuntungan komersil. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru* maka berubah menjadi akad *tijarah*. Bila ingin tetap menjadi akad *tabarru*, maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad *tabarru* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru*.⁹ Akad *kafalah* termasuk kedalam akad *tabarru* adapun pengertian Akad *kafalah*, Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000 yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

⁷ Dewi Riyanti, *Analisis Penetapan Ujroh Berdasarkan Prosentase Melalui Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Umroh DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP RANCAEKEK*, (Skripsi 2017).

⁸ Ascaraya, *Op.Cit.*, hlm. 109.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 6.

ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*). Sedangkan pengertian *ujrah* adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan.¹⁰ Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh *kafalah*, yaitu: kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.¹¹

Pendapat para ulama tentang *kafalah bil ujah*¹²

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi.

Para ulama dalam mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *kafalah* dan imbalan tidak sah bila *kafil* (penjamin) mensyaratkan imbalan dari jaminan yang dia berikan kepada pihak yang dijamin *makful 'anhu*, dan bila tidak disyaratkan dalam akad dan pihak yang dijamin memberikan imbalan dengan sukarela maka imbalannya tidak sah namun akad *kafalah* tetap sah.

Ibnu Nujaim berkata:

ولو كفّل رجل عن رجل على أن يجعل له جعلا فهذا على وجهين: إما أن يكون الجعل مشروطا في الكفالة أو لا فإن لم يكن مشروطا في الكفالة فالجعل باطل والكفالة جائزة فأما إذا كان الجعل

مشروطا في الكفالة ذكر أن الجعل باطل والكفالة باطلة (البحر الرائق) 242/6

¹⁰ Ascaraya, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹¹ Atang Abd.Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 277.

¹²Erwinda Tarmizi, "*Kafalah Bil Ujah (Imbalan Akad Jaminan) Dalam Pandangan Fiqh Islam*", (internet resources), diakses 01 Januari 2018 melalui <http://ustadzsbu.blogspot.co.id/2009/04/kafalah-bil-ujrah-imbalan-akad-jaminan.html?m=1>.

Seseorang melakukan akad *kafalah* terhadap orang lain dan menerima imbalan dari orang yang dijamin. Akad ini memiliki 2 bentuk: 1. Imbalan tidak disebutkan/disyaratkan dalam akad maka hukum imbalannya tidak sah namun akadnya tetap sah. 2. Imbalan disebutkan/disyaratkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah*nya tidak sah.

2. Pendapat ulama mazhab Maliki.

Para ahli fiqh dalam mazhab Maliki menghukumi akad *kafalah* dengan imbalan tidak sah (fasid) tanpa membedakan imbalan yang disyaratkan pada saat akad ataupun tidak. Ad Dasuki berkata:

والضمان هو الحماله إذا كانت الحماله فاسدة شرعا غير مستوفية للشروط كانت غير معتد بها كما إذا كانت بجعل فهي فاسدة.. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 77/3

“*Kafalah* yang tidak sah adalah *kafalah* yang tidak memenuhi syarat, seperti; menerima imbalan dari *akad kafalah*.”

3. Pendapat ulama mazhab Syafi’i

Pendapat para fuqoha dalam mazhab Syafi’i sama dengan pendapat ulama dalam mazhab Hanafi, yaitu: bila imbalan disebutkan dalam akad maka imbalan dan akad *kafalah* tidak sah, namun bila tidak disyaratkan dan diberikan dengan sukarela maka akad *kafalah*nya sah namun imbalannya tidak sah. Al Mawardi berkata:

الحاوي الكبير فصل : فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز. وكان الجعل باطلا.
والضمان إن كان بشرط الجعل فاسدا. 443/6

“Jika seseorang meminta orang lain untuk menjadi penjaminnya dan dia akan memberikan imbalan kepadanya, akad ini tidak dibolehkan. Dan imbalannya tidak sah. Dan akad *kafalah* yang dengan persyaratan imbalan tidak sah”.¹³

¹³ Abi Hasan ali bin Muhammad bin Habib almawardi albusyuri, *Al Hawi Kabir*, 1994 M/ 1414 H, juz VI, Hal 443. Diakses dari kitab digital tanggal 03 Januari 2018, pukul 02.50.

4. Pendapat ulama mazhab Hanbali.

Para ahli fiqih dalam mazhab Hanbali juga tidak membolehkan menerima imbalan dari akad *kafalah* secara mutlak, baik disyaratkan ataupun tidak disyaratkan. Ibnu Qudamah berkata;

ولو قال : اكفل عني ولك ألف . لم يجز. (المغني 441/6)

“Jika seseorang berkata kepada orang lain,” jadilah engkau penjaminku dan aku akan memberimu imbalan seribu,” akad ini tidak boleh.”¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian, “**Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ujrah* Pada Akad *Kafalah***” yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang Majelis Ulama Indonesia menerapkan *ujrah* terhadap akad *kafalah*.

B. Rumusan Masalah

Pada dasarnya menurut ekonomi islam pelaksanaan *ujrah* pada akad *kafalah* ini dibolehkan karena sudah ada Fatwa yang mengaturnya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000. Sedangkan tidak ada seorangpun dari 4 (empat) Imam Madzhab yang membolehkan perolehan *ujrah* atas akad *kafalah*. Pendapat fuqoha seperti Imam Madzhab Syafi’i sama dengan pendapat Imam Madzhab Hanifah, begitupun dengan Imam Madzhab Hanbal dan Imam Madzhab Malik semuanya berpendapat bahwa perolehan *ujrah* pada akad *kafalah* tidak sah.

¹⁴ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Aqudamah *Al Mugni*, juz VI. Hal 441. Diakses dari Kitab Digital tanggal 03 Januari 2018, pukul 08.03.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *Ujrah* terhadap akad *kafalah* ?
2. Bagaimana pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/VI/2000 penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah* ?
3. Bagaimana kesesuaian antara Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *ujrah* terhadap *Kafalah* dengan pendapat Ulama Kontemporer ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *Ujrah* terhadap akad *kafalah*.
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.11/DSN-MUI/VI/2000 penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah*.
3. Untuk mengetahui kesesuaian antara Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah* dengan pendapat Ulama Kontemporer.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dapat memberikan pemahaman kepada penulis mengenai dasar dalam penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ujrah* terhadap akad *kafalah*.
2. Memberikan pengetahuan baru kepada penulis dan pembaca mengenai hal yang diteliti.
3. Dapat memberikan tambahan informasi dan referensi khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah studi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan *Kafalah Bil Ujrah*. Tujuan adanya telaah untuk menghindari terjadinya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian. Penelitian yang sebelumnya yang berkaitan tentang *kafalah Bil Ujrah*.

Tabel 1.1

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Uraian
1.	Ajeng Mar'atus Soliah, prodi Akutasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2012.	Penerapan Akad <i>Kafalah</i> pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam	Dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad <i>kafalah bil ujah</i> dimana LKS sebagai penjamin yang menjamin dengan cara memfasilitasi dana pembiayaan bagi anggota yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dalam hal pengambilan keuntungan (<i>ujrah</i>), sebagaimana yang telah disepakati beberapa ulama bahwa dalam <i>kafalah</i> , <i>kafil</i> diperbolehkan mengambil upah (<i>ujrah</i>) atas tanggungannya asal tidak memberatkan bagi anggota, akad <i>kafalah bil ujah</i> ini diberlakukan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan kesehatan dan pendidikan dan anggota tersebut belum berstatus mempunyai hutang kepada pihak rumah sakit atau sekolah.

2.	Hamzah Zainuri dan Ar Royan Ramly, prodi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah dan hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta.	Fee pada perjanjian <i>Kafalah</i> (Analisi Bank Garansi)	Pengambilan <i>fee</i> atau upah pada bank syariah berdasarkan perhitungan nominal dari keseluruhan <i>everhead cost, fee base cost</i> , komite, dan materai, sedangkan pada bank konvensional terdapat pengambilan keuntungan berdasarkan prosentase perjanjian yang diberikan yang berkisar 1-3% sesuai <i>bargaining</i> pihak bank dan nasabah tersebut. Pengambilan <i>fee</i> atau upah pada bank syariah berdasarkan perhitungan nominal dari keseluruhan <i>everhead cost, fee base cost</i> , komite, dan materai, sedangkan pada bank konvensional terdapat pengambilan keuntungan berdasarkan prosentase perjanjian yang diberikan yang berkisar 1-3% sesuai <i>bargaining</i> pihak bank dan nasabah tersebut.
3.	Neneng Komalasari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,	Pelaksanaan Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> Dalam Produk IB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surapati Core	Akad yang digunakan dalam kartu kredit card adalah <i>kafalah bil ujrah</i> dimana bank menjamin penjamin bagi pemegang IB Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card. Atas pemberian <i>kafalah</i> maka bank BNI

	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,		Syariah dapat menerima <i>monthly membership fee</i> dari pemegang kartu IB Hasanah Card. atas <i>ijarah</i> ini pemegang iB Hasanah Card akan dikenai biaya yang disebut annual membership fee.
3.	Neneng Komalasari, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,	Pelaksanaan Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i> Dalam Produk IB Hasanah Card Di Bank BNI Syariah Surapati Core	Akad yang digunakan dalam kartu kredit card adalah <i>kafalah bil ujrah</i> dimana bank menjamin penjamin bagi pemegang IB Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card. Atas pemberian <i>kafalah</i> maka bank BNI Syariah dapat menerima <i>monthly membership fee</i> dari pemegang kartu IB Hasanah Card. atas <i>ijarah</i> ini pemegang iB Hasanah Card akan dikenai biaya yang disebut annual membership fee.
4.	Erli Nuryadi, prodi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam), fakultas Syariah	Analisa Pemberian Bank Garansi Dalam Sistem Syariah (<i>Kafalah</i>) dan Pelaksanaan Pada PT Bank	Ketentuan garasi (<i>kafalah</i>) dalam sistem perbankan syariah sebagaimana yang ada di PT Bank Syariah Muamalat Indonesia telah terkonsep sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Pelaksanaan pemberian jasa <i>kafalah</i> di Bank Muamalat Indonesia

<p>dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah</p>	<p>Muamalat Indonesia.</p>	<p>dilakukan dengan adanya permohonan dari nasabah sebelumnya. Dilakukan dengan melalui beberapa tahap, tahap pertama adalah permohonan <i>kafalah</i> oleh nasabah yang akan jadi jaminan, pemberian fasilitas <i>kafalah</i>, keputusan pemberian <i>kafalah</i>, pengikatan akad pemberian fasilitas <i>kafalah</i>, penyelesaian pemberian fasilitas <i>kafalah</i>, <i>kafalah</i> telah jatuh tempo tetapi dalam surat asli <i>kafalah</i> belum dikembalikan oleh nasabah, memberitahukan kepada pihak yang dijamin atau nasabah untuk mengembalikan surat tersebut kepada bank, apabila telah dilakukan pemberitahuan namun nasabah belum juga melakukan pengembalian maka pihak bank akan menyegel dokumen <i>kafalah</i> tersebut yang masih trsimpan di bank dengan pernyataan tidak berlaku kemudian nasabah diminta untuk menandatangani kertas bermaterai yang berisi keterangan bahwa nasabah tidak mampu menyerahkan kembali surat asli <i>kafalah</i></p>
--	--------------------------------	--

			dengan diikuti penjelasan beserta alasan-alasannya.
5.	MUTOLIB, Prodi Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.	Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Nomor 77/DSN- MUI/2010 Tentang Jual Beli Emas Tunai Secara Tidak.	Yang melatar belakangi lahirnya fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah, (1). Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai; (2). Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. (3). Adanya surat perihal permohonan fatwa <i>murabahah</i> emas dari Bank Mega Syari'ah No. 001/BSM/DPS/I/10. Dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI dalam memutuskan fatwa tentang jual beli emas secara tidak tunai adalah berupa al-Qur'an; Hadits Nabi SAW; Kaidah Ushul, Kaidah Fikih, Pendapat Ulama, dan Ijtihad (Musyawarah). Berdasarkan kaidah-

			kaidah adat dan kemashlahatan, maka jual beli emas secara tidak tunai adalah boleh (<i>mubah</i>) dilakukan selama emas dimaksudkan sebagai <i>sil'ah</i> (barang/komoditi) dan tidak sebagai <i>tsaman</i> (<i>naqd</i>). Dengan ketentuan tetapnya harga selama perjanjian.
--	--	--	---

2. Kerangka pemikiran

Akad adalah kontrak antara dua belah pihak, fiqih muamalah membagi akad menjadi duabagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah/mu'awadah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad ini dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata, oleh sebab itu akad ini bertujuan untuk mencari keuntungan komersil. Contoh akad *tabarru* adalah akad dalam meminjamkan uang (*qard, rahn, hiwalah*), akad ini dalam meminjamkan jasa kita ada beberapa akad yaitu (*kafalah, wakalah, wadi'ah*), dan akad dalam memberikan sesuatu (*hibah, waqf, shadaqoh, dan lain-lain*).¹⁵

Akad yang menjadi bahan penelitian ini termasuk kedalam akad *tabarru* yaitu akad tolong menolong atau salah satu akad yang menjadi keikhlasan karena dimana tidak mengharapkan imbalan apapun dan akad tersebut ialah akad *kafalah*.

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*, hlm. 66.

Definisi dari akad *kafalah* secara bahasa *kafalah* berarti *dhaman* (menggabungkan), sedangkan secara istilah akad *kafalah* adalah penggabungan tanggungan yang satu kepada yang lain tentang hak yang paling menuntut. Dalam perspektif Madzhab Hanafi *kafalah* itu memiliki dua makna yaitu *kafalah* berarti menanggungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam penagihan dengan jiwa, utang atau zat benda dan *kafalah* berarti menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* yang lain dalam pokok (asal) utang.

Sedangkan dalam perspektif Madzhab Maliki, *kafalah* berarti orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda. Madzhab Hanbali megartikan *kafalah* dengan *iltizam*, sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau *iltizam* orang yang mempunyai hak. Adapun Imam Mazhab Syafi'i mengatakan *kafalah* dengan akad yang menetapkan *iltizam* yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkannya. Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan definisi dari *kafalah* ini adalah menggabungkan dua benda (tanggungan) dalam permintaan dan utang. Keabsahan *kafalah* ini didasarkan pada Al-Qur'an.¹⁶

Dalam surat Yusuf ayat 66 Allah SWT berfirman:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَن تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

¹⁶ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 125-126.

Ya'qub berkata: Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". tatkala mereka memberikan janji mereka, Maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini).¹⁷

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman surah yusuf ayat :72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".¹⁸

Definisi upah menurut Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 102 Tahun 2004 adalah hak yang diterima pekerja dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja karena yang dibayarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja karena jasa yang diberikannya.¹⁹ Upah dalam islam termasuk juga dalam bab *ijaroh* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijaroh* berarti upah “upah” atau ganti atau imbalan, karena itu *lafadz ijaroh* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan atau sesuatu kegiatan atau upah melakukan sesuatu aktifitas.²⁰

¹⁷ Diambil dari Al-Qur'an digital Surat Yusuf ayat:66 (pada tanggal 01 Januari 2018 pada pukul 06.05).

¹⁸ Diambil dari Al-Qur'an digital Surat Yusuf ayat :72 (pada tanggal 01 Januari 2018 pukul:06:34).

¹⁹ <http://fiqihislam.blogspot.co.id/pengertian-ujrah-atau-upah.html?m=1> diambil pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 07.43).

²⁰ Muntolib, *Studi Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No/DSN-MUI/2010*, (Skripsi, 2012).

Definisi *al-ujroh* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²¹ Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana didalam Al-Qur'an dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri.

Firman Allah *Q.S At-Thariq: 6*

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۖ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 118.

sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²²

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*),²³ karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

2. Sumber Data

Karena dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka sumber data yang akan digunakan yaitu:

a. Data Primer

Data yang diambil dari sumber asli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, dapat pula diartikan bahwa bahan hukum primer adalah data pokok yang tertulis atau tercatat yang digunakan sebagai bukti atau keterangan yang sah.²⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pertama hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini, kedua dilihat

²² Diunduh dari Al-Qur'an Terjemaah (Add-Ins), *QS.Ath-Thalaq Ayat 6*, (pada tanggal 10 januari 2018, pukul 17.45).

²³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 15.

²⁴ <http://Metode-Penelitian.dinaremas24k.org/?p=163>. Di unduh pada tanggal 29 Desember 2017. pukul 15.35.

dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah* (penerapan *ujrah* terhadap akad *kafalah*).

b. Data Sekunder

Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab-kitab tafsir, syarah hadits, kitab-kitab fiqh khususnya fiqh mu'amalah, buku-buku tentang mu'amalah, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, juga data-data berupa artikel yang berasal dari internet yang ditulis oleh para pakar atau praktisi dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini.²⁵

c. Data tertier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa arab dan yang lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan datanya adalah dengan cara mencari dan mengumpulkan buku-buku atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan dengan cara membaca,

²⁵<http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=64193&title=sejarahemas>.
Diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 00.31.

memahami dan kemudian mengklasifikasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, selanjutnya disusun secara sistematis dan menjadi suatu kerangka sehingga mudah untuk difahami, kemudian baru dilakukan dengan penganalisaan.²⁶ Disamping itu juga ditelusuri seta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung atau menunjang kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis data sesuai dengan kandungan isinya, dengan pendekatan komperatif (*comperative aproach*). Adapun metode dalam penulisannya yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Deskriptif*, yaitu menganalisa data-data yang berhubungan dengan judul pembahasan ini yang dikumpulkan secara sistematis, kemudian dipaparkan apa adanya.
- b. *Komparatif*, yaitu dengan membandingkan pendapat-pendapat para ulama, sarjana, dan ilmuwan yang kemudian diambil pendapat yang paling kuat (*rajih*) untuk diterapkan sebagai dasar terhadap masalah pokok. Atau dengan jalan tengah-tengah dalam mengambil kesimpulan.

²⁶ http://issu.com/fais1234/docs/murabahah_emas_/2?mode=a_p. Diunduh pada tanggal 30 Desember 2017, pukul 01.30